



Judul : Bikin susah masyarakat saja: Wacana ganjil-genap saat mudik baiknya dikaji lagi
Tanggal : Sabtu, 08 April 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Rakyat Merdeka
SABTU, 8 APRIL 2017

Bikin Susah Masyarakat Saja

Wacana Ganjil-genap Saat Mudik Baiknya Dikaji Lagi

Komisi V DPR kurang sreg dengan wacana penerapan sistem nomor polisi ganjil-genap di jalan tol saat mudik Lebaran nanti. Komisi bidang Perhubungan ini khawatir, penerapan sistem tersebut membuat susah masyarakat yang mau bersilaturahmi dengan keluarga di kampung saat hari raya.

WACANA penerapan sistem ganjil genap ini mengemuka dalam rapat terbatas terkait persiapan Idul Fitri 2017 yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana, Senin lalu. Dalam rapat itu, Presiden meminta para bawahannya membuat strategi agar tidak ada lagi kemacetan panjang seperti yang tahun lalu yang terjadi di Pintu Tol Brebes Timur alias Brexit.

Berbagai strategi pun diwacanakan. Dari mulai pembatasan jumlah kendaraan yang masuk tol, sampai menerapkan sistem nomor polisi ganjil-genap. Ganjil-genap mengemuka sebagai alternatif sistem ini dalam mengurangi kemacetan di Jalan MH Thamrin dan Sudirman, Jakarta. Dengan sistem ini, kendaraan yang boleh melintas hanya yang angka belakang pada nomor polisinya sesuai tanggal hari itu. Misalnya, untuk tanggal ganjil, maka yang boleh melintas adalah kendaraan dengan angka belakang pelat nomornya ganjil. Untuk yang genap akan kena tilang. Demikian sebaliknya.

Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro mendukung upaya pemerintah mencari cara mengurangi

kemacetan saat mudik Lebaran. Sebab, masalah macet tersebut telah banyak merugikan masyarakat. Namun, sistem ganjil-genap dipandang tidak cocok. Sistem ini justru bisa menyusahkan masyarakat.

"Pada dasarnya, Komisi V DPR mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan saat mudik Lebaran. Namun, pemerintah harus bekerja secara cermat agar wacana yang digulirkan tak menimbulkan persolan baru," kata politisi Gerindra ini, kemarin.

Dengan sistem ini, masyarakat harus mengatur ulang jadwal mudiknya. Padahal, urusan mudik berbeda dengan urusan pekerjaan sehari-hari. Dengan aturan ini, masyarakat yang nomor polisi kendaraannya tidak sesuai dengan tanggal bisa terlambat mudik.

Selain itu, kata Nizar, mudik juga memerlukan waktu yang panjang. Bisa saja, pada saat berangkat, pelat nomor kendaraan masih sesuai dengan tanggal. Tapi, karena terjebak macet lalu kemalaman, dan hari pun berganti tanggal, pelat nomor mereka tidak sesuai lagi.

"Kalau kondisinya seperti ini, bagaimana?" tanyanya.

Menurut Nizar, cara paling efektif dalam mengurangi kemacetan arus mudik Lebaran adalah perbaikan serta meningkatkan kualitas jalan Tol. Jangan ada lagi jalan yang berlubang dan penyempitan arus. Pintu-pintu tol juga harus dipersiapkan dengan baik agar tidak terjadi penumpukan, apalagi penyumbatan.

"Sebaiknya, sebelum arus mudik Lebaran, infrastruktur seperti jalan dan tol sudah siap. Apalagi Menteri PUPR sudah berjanji (selesaikan perbaikan jalan tol)," ucapnya.

Namun, jika Pemerintah nanti merasa sistem ganjil-genap itu sudah baik, Nizar tidak bisa menghalang-halangi. Dia hanya berpesan agar sistem tersebut disosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Agar semua masyarakat tahu adanya penerapan sistem itu.

"Kalau aturan itu (ganjil-genap) disetujui, segera lakukan sosialisasi. Kurangnya sosialisasi berpotensi memunculkan masalah baru, bukan mengurangi kemacetan," terangnya.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto menjelaskan, Pemerintah belum membuat keputusan mengenai sistem yang bakal diterapkan. Pemerintah masih melakukan kajian dan menghitung-hitung sistem mana yang paling efektif dan tidak merugikan masyarakat. ■ ONI